

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi pemerintahan maupun organisasi bisnis saat ini harus selalu melakukan perubahan di segala bidang agar tidak terlindas oleh pesaing. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan dalam memperoleh keuntungan kompetitif yaitu dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) untuk proses yang ada dalam suatu organisasi baik dalam organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, mengingat tujuan dari perencanaan strategis informasi yakni menyiapkan rancangan pengelolaan analisis, perencanaan peningkatan sistem yang berbasis komputer. Perencanaan strategis dari segi data, pandangan strategisnya merupakan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh *enterprise*, dan dari segi aktivitas tinjauan strategisnya yakni untuk peningkatan kinerja dalam hal pemanfaatan teknologi.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan tentang pembentukan susunan perangkat daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung adalah Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan (“Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung; Nomor 9 Tahun 2016”).

Pajak merupakan bagian yang sangat penting sebagai bentuk penerimaan daerah. Ada beberapa pajak dikelola oleh pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah daerah, pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat menjadi sumber pendapatan negara di dalam APBN, dan yang dikelola pemerintah daerah menjadi

sumber pendapatan daerah di dalam APBD. Pada hakekatnya bayar pajak merupakan kewajiban kepada setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan iuran terhadap kas negara yang berlandaskan undang-undang serta tiada menerima jasa timbal yang terus bisa ditunjukkan, lalu hasilnya dipergunakan bagi keperluan umum, dana yang diperoleh sumber-sumber pajak dimanfaatkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional (Faithya, 2017).

Pendapatan daerah yakni seluruh pemasukan yang dimiliki daerah yang menjadi tambahan penghasilan dalam kurun waktu penghitungan bersangkutan (“Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,”). Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dari dana perimbangan di tingkat pusat dan daerah, selain itu bisa bersumber dari daerah seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004”).

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut.
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pendapatan daerah yang sah

Kabupaten Klungkung yang merupakan kabupaten terkecil di pulau bali berupaya untuk memperbaiki pembangunan diwilayahnya, Kabupaten Klungkung berupaya menaikan pemasukan daerahnya menggunakan sektor pajak daerah. Beberapa jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009,”).

1. Pajak Provinsi seperti.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Rokok
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten/ Kota seperti.

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak penerangan jalan
- e. Pajak reklame
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak air tanah
- h. Pajak parkir
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Pendapatan daerah yang dikelola oleh BPKPD terdiri dari 10 pajak daerah dan retribusi daerah meliputi: pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, PPJ, pajak parkir, ABT, pajak sarang walet, PBB-P2, serta BPHTB.

Pemasukan Kabupaten Klungkung 2017 yakni Rp. 153.233.910.223,61-. dan pada 2018 yakni Rp. 186.974.283.820,89-. Permasalahan yang terjadi yakni:

1) Adanya suatu sistem informasi/ teknologi informasi yang sudah berjalan akan tetapi dari segi keperuntukan sistem informasi yang ada belum sepenuhnya dapat dipergunakan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) didalam penentuan suatu sistem informasi dan teknologi informasi, belum dikaji lebih dalam sehingga hal tersebut menimbulkan kendala dikemudian hari. 2) Kurangnya fasilitas SI/TI pada BPKPD Kabupaten Klungkung karena tidak mempunyai arahan yang strategis dalam pengembangannya. 3) Kesulitan dalam menentukan kebutuhan SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi.

Mengingat besarnya pendapatan daerah Kabupaten Klungkung yang harus dicapai, maka diperlukan cara pengelolaan pendapatan daerah yang baik, efisien, efektif, serta akuntabel. Salah satu cara adalah dengan mewujudkan pemanfaatan SI/TI melalui implementasi aplikasi pada berbagai fungsi organisasi, dalam hal ini perlu diadakan suatu perencanaan strategis cara pengembangan yang tepat terhadap proses bisnis yang dimiliki.

Enterprise Architecture Planning (EAP) merupakan suatu metode atau kerangka acuan dalam membentuk sebuah arsitektur informasi yang menitik beratkan atas keperluan bidang usaha meliputi arsitektur data, aplikasi serta teknologi konsep penerapannya membawa aktivitas bisnis, tercapainya tujuan dari

suatu organisasi. *Enterprise Architecture Planning (EAP)* terdapat arsitektur data, aplikasi serta teknologi yang diperlukan untuk mendukung bisnis organisasi yang akan dihasilkan portofolio aplikasi mendatang yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi.

Alasan mengapa suatu organisasi dalam hal ini BPKPD perlu menerapkan SI/TI secara terencana yaitu untuk menghindari kemungkinan yang dapat terjadi yaitu.

1. Pengembangan SI/TI menjadi tidak sesuai dengan strategi organisasi
2. Penggunaan dana tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya
3. Pengembangan SI/TI tidak berpola dan tidak adanya keterpaduan antara sub sistem yang ada tidak terintegrasi, heterogen, dan holistik)

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin membuat suatu penelitian tentang **Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Pendekatan *Enterprise Architecture Planning (EAP)* (Studi Kasus : BPKPD Kabupaten Klungkung).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan penjelasan dalam latar belakang, maka identifikasi masalahnya adalah.

- a. Sistem informasi/ teknologi informasi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah sekarang dan masa mendatang.

- b. Belum dirumuskan apa yang harus disediakan untuk masa mendatang pada BPKPD ditinjau dari perencanaan strategis sistem informasinya.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di BPKPD Kabupaten Klungkung.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini bisa terlaksana sesuai tujuan, maka ditetapkan batasan penelitiannya sebagai berikut.

- a. Perencanaan strategis sistem informasi pendapatan daerah Kabupaten Klungkung lebih banyak diteliti dari segi SI/TI pengelolaan pendapatan daerahnya.
- b. Dalam penelitian ini lebih banyak membahas Bidang Pendapatan Daerah yaitu Bidang Pendataan, Penetapan, Pengolahan Data dan Bidang Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan.
- c. Penelitian terbatas pada pendefinisian proses bisnis dan arsitekturnya, tidak mendesign maka implimentasinya tiada membuat *system*, *networking*, serta *database*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dijabarkan rumusan masalahnya seperti berikut.

- a. Bagaimana perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang mencakup arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur

teknologi dan rencana penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di BPKPD?

- b. Bagaimana hasil validasi perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang mencakup arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi dan rencana penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di BPKPD?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini yakni memberikan solusi didalam pembangunan sistem informasi dan teknologi informasi dalam menyusun perencanaan strategis di BPKPD seperti berikut.

- a. Merancang perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang mencakup arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan rencana penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di BPKPD.
- b. Memvalidasi perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang mencakup arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi dan rencana penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di BPKPD.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat yang didapatkan yaitu.

1.6.1 Manfaat Akademik

Menyampaikan kerangka acuan dalam membuat atau mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Klungkung.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu BPKPD menjadi organisasi bisnis untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diterapkan di masa yang akan datang.

